

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah kualitas *Supreme Audit Institution*, tingkat korupsi dan tipe hukum negara. Subjek penelitiannya adalah negara-negara di dunia yang memiliki indeks SAI dan indeks persepsi korupsi tahun 2012, 2015 dan 2017, serta yang menganut sistem *civil law* atau *common law*.

3.2 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018, p.8). Dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut, kemudian dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018, p.11).

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif-kausal, yakni menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat. Terdapat variabel independen/bebas (yang memengaruhi) dan variabel dependen/terikat (yang dipengaruhi) (Sugiyono, 2018, p. 37). Studi kausal dilakukan agar mampu menyatakan bahwa variabel bebas menyebabkan variabel terikat (Sekaran & Bougie, 2017, p. 112).

Penelitian ini menguji secara empiris variabel independen-kualitas SAI yang diduga memengaruhi variabel dependen-tingkat korupsi yang diproksikan dengan indeks persepsi korupsi, serta faktor yang diduga memperkuat atau memperlemah hubungan di antara keduanya yakni tipe hukum negara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara-negara diseluruh dunia, karena merujuk pada kualitas SAI-nya, tingkat korupsi setiap negara dan budaya hukum negara yang

dianutnya. Data yang digunakan berupa *unbalance* data panel yang berisi indeks SAI dan indeks persepsi korupsi, di tahun 2012, 2015 dan 2017.

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.2.2.1 Definisi Variabel

Kerlinger dalam Sugiyono (2018, p. 39) mengatakan, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Penelitian ini akan menggunakan variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderator.

1. Variabel Terikat: Tingkat Korupsi

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat, atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Melalui analisis variabel terikat, terdapat kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah tersebut (Sekaran & Bougie, 2017, p. 77). Klitgard dalam Dye & Staphenurst, 1997; Kayrak, 2008; Ramirez & Perez, 2016, mengembangkan model sederhana dalam menjelaskan dinamika korupsi atau kondisi yang menyebabkan praktik korupsi dengan rumus berikut:

$$\text{Corruption} = \text{Monopoly Power} + \text{Discretion} - \text{Accountability}$$

Di dalam Ramirez & Perez (2016) terdapat pendekatan korupsi secara struktural yang dirumuskan Sandoval-Ballesteros, yang menggambarkan bentuk khusus dari karakteristik sosial akibat penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya, dan sebagai akibatnya adalah perbedaan yang tajam pada kekuatan struktural.

$$\text{Corruption} = \text{Abuse of Power} + \text{Impunity} - \text{Citizen Participation}$$

Rumus tersebut menunjukkan tiga elemen penting, yaitu: 1) penyalahgunaan kekuasaan, 2) kurangnya hukuman dan impunitas bagi pelaku yang melakukan korupsi di sektor privat maupun publik, dan 3) hilangnya kekuatan masyarakat yang menandakan keretakan dengan kelas politis.

Telah diketahui bahwa tidak ada cara objektif untuk mengukur tingkat korupsi. Jika korupsi dapat diukur, sudah tentu dapat dieliminasi. Pada kenyataannya, secara konseptual, tidak jelas apa yang dapat diukur (Tara et al., 2016). Tanzi dalam Tara et al. (2016) mengatakan, tidak ada cara langsung untuk mengukur korupsi. Beberapa cara untuk memperoleh informasi tentang adanya korupsi di suatu negara atau institusi di antaranya: 1) laporan tentang korupsi yang tersedia dalam sumber yang dipublikasi, 2) studi kasus korupsi seperti otoritas pajak, 3) survei berbentuk kuesioner, yang dapat dihubungkan dengan institusi tertentu atau negara secara keseluruhan. Survei tersebut mengukur persepsi korupsi daripada korupsi itu sendiri. Survei terbaik yang terkenal terkait dengan tujuan ini dilakukan oleh *Transparency International* yang menghasilkan *Corruption Perception Index* (CPI). Penelitian ini menggunakan CPI. CPI di antaranya digunakan dalam penelitian Gustavson & Sundstorm (2016); Tara et al. (2016).

2. Variabel Bebas: Kualitas SAI

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel bebas maka ada variabel terikat. Setiap unit kenaikan/penurunan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017, p. 79).

Dalam penelitian ini, kualitas SAI dinilai dari tiga karakteristik, yaitu: 1) independensi, 2) kapasitas institusional, dan 3) kegunaan informasi. Independensi memungkinkan SAI melakukan pengawasan tanpa tekanan politik dan konflik kepentingan. Hal ini dapat memberikan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar bagi tindakan pengendalian. Sedangkan, kapabilitas insitusional mengacu pada karakteristik hukum dan teknis yang harus dimiliki dan diadopsi SAI. Karakteristik kualitas SAI diukur dalam indeks SAI yang dikeluarkan oleh *International Budget Partnership* (Ramirez & Perez, 2016).

Penelitian ini menggunakan indeks SAI, seperti halnya penelitian Rios, Bastida, & Benito (2014) yang menggunakan indeks kualitas oversight legislatif dari IBP. IBP mengukur tiga elemen dalam surveinya (yakni *Open Budget Survery/OBS*), salah satu di antaranya adalah kualitas institusi pengawas, yaitu legislatif dan lembaga eksternal audit. OBS adalah survei independen yang dapat dibandingkan (*comparative survey*) pertama yang mengukur transparansi dan akuntabilitas anggaran. Agar memungkinkan adanya perbandingan lintas negara, IBP membuat suatu indeks berdasarkan pertanyaan dalam survei (Seifert, Carlitz, & Mondo, 2013). Indeks dari IBP di antaranya digunakan dalam penelitian Cimpoeru & Cimpoeru (2015); Rios et al. (2014); Brusca et al. (2017); Ramirez & Perez (2016). Akan tetapi, dalam penelitian ini, indeks yang digunakan hanya indeks SAI.

3. Variabel Moderator: Tipe Hukum Negara

Variabel moderator adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel bebas dan terikat, yang mana kehadiran variabel ketiga mengubah hubungan awal keduanya (Sekaran & Bougie, 2017, p. 80). Variabel moderator memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderator disebut juga sebagai variabel independen kedua (Sugiyono, 2018, pp. 39-40). Variabel moderator dalam penelitian ini adalah variabel dikotomi, yakni variabel yang hanya memiliki dua kategori, atau disebut juga dengan *dummy variable*. Tipe hukum dalam penelitian ini diukur dengan dua kategori, yakni 0 untuk *civil law* dan 1 untuk *common law*.

Penentuan angka untuk kedua kategori tersebut didasarkan pada dua alasan. Pertama, negara yang mengadopsi budaya hukum. *Common law* diadopsi di negara maju seperti Australia, Kanada, New Zealand, Amerika dan Inggris. Seperti yang dikatakan Lidyah (2016), negara-negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik *fraud* memiliki modus yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara berkembang yang memiliki banyak modus untuk dilakukan. Sedangkan Sadaf et al., (2018) menyatakan,

negara-negara *Anglo-Saxon (common law)* mengungkapkan lebih banyak kasus *fraud* daripada negara lainnya, yang jika dihubungkan, hal ini mungkin dikarenakan negara tersebut memiliki pengadilan terbaik dengan hakim profesional dan paling tidak korup di dunia dengan segudang pengalaman tentang kasus-kasus sebelumnya dalam menangani *fraud*.

Kedua, melihat keyakinan beberapa peneliti terkait *common law*. Berdasarkan studi kasus terkait *common law* yang dilakukan Meiners dan Yande di Amerika, mereka berpendapat bahwa dengan karakteristik sistem hukum (*common law*) yang mana putusan kasus dibuat oleh hakim yang independen, lebih memungkinkan menghasilkan prinsip-prinsip yang bijaksana daripada badan legislatif yang menghasilkan aturan yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu (Germani, 2007). Sejalan dengan yang diungkapkan Hayek bahwa ia percaya pada keunggulan *Common Law* yang administrasinya dikelola oleh hakim dan pengadilan, yang sangat independen dari pemerintah. Berbeda dengan *civil law* yang dianggap dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, menurutnya, *common law* terdiri dari kumpulan prinsip-prinsip umum yang dapat lebih dijelaskan dan dikembangkan oleh hakim dalam keputusannya sendiri (Germani, 2007).

Sedangkan pendapat yang penulis temukan tentang *civil law* yakni menurut Abdelsalam (2017), bahwa *civil law* dapat digunakan sebagai alat yang kuat untuk memberantas korupsi. Akan tetapi, keyakinan ini tidak disertai pendapatnya tentang *common law*. Dengan demikian, dengan pertimbangan di atas, penulis menentukan angka yang lebih tinggi pada *common law* dalam penelitian ini.

1.2.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif, yang tidak seperti variabel yang lebih objektif seperti usia dan tingkat pendidikan yang mudah diukur dengan pertanyaan langsung dan sederhana (Sekaran & Bougie, 2017). Konsep abstrak kuitas SAI dan Tingkat Korupsi, masing-masing diukur oleh IBP dan TI dengan melaksanakan survei. Hal ini tentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan masing-masing lembaga tersebut. IBP

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sendiri memiliki partner di masing-masing negara dalam melaksanakan surveinya, seperti misalnya parternya di Indonesia adalah FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) (IBP, 2017). Di sisi lain, TI mengukur tingkat korupsi dengan melakukan survei kepada ahli dan beberapa perusahaan prestisius yang independen di masing-masing negara, tentang persepsi mereka terhadap korupsi yang dilakukan pejabat publik (Ramirez & Perez, 2016).

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kualitas <i>Supreme Audit Institution</i> (X)	SAI yang berkualitas dilihat dari tiga karakteristik: independensi, kapabilitas dan kegunaan informasi yang dihasilkan (Ramirez & Perez, 2016)	Skor indeks SAI dari IBP antara 0-100. Semakin tinggi skor, semakin tinggi kualitas SAI	Variabel kontinu - interval
Tingkat Korupsi (Y)	Korupsi di sektor publik yang melibatkan pejabat dan pegawai publik serta politisi (Ramirez & Perez, 2016)	Skor <i>Corruption Perception Index</i> dari <i>Transparency International</i> antara 0-100. Semakin tinggi skor, semakin rendah tingkat korupsi	Variabel kontinu - interval
Tipe Hukum Negara (M)	Tipe hukum dalam penelitian ini adalah <i>common law</i> dan <i>civil law</i>	1: <i>Common law</i> 0: <i>Civil Law</i>	Variabel <i>dummy</i>

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara di dunia. Menurut PBB, total negara di dunia ada 195 negara. Negara-negara tersebut merupakan anggota PBB.

3.2.3.2. Sampel

Informasi tentang kualitas SAI diperoleh dari survei IBP. Tingkat korupsi (*Corruption Perception Index*) diperoleh dari *Transparency International*. Dengan menggabungkan keterangan tentang tipe hukum negara dan kedua data (di tahun 2012, 2015 dan 2017) tersebut, maka diperoleh 152 observasi (*unbalanced panel*). Negara yang menjadi sample penelitian adalah 55 negara. Sample tersebut dihasilkan menggunakan teknik sampling *non-probability sampling* dengan *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Tabel 2. Prosedur Pemilihan Sampel

Jumlah negara anggota PBB	195
Negara yang tidak menganut <i>civil law</i> atau <i>common law</i>	(102)
Negara yang tidak memiliki skor CPI dan SAI	(47)
Negara sampel	55
Total sampel (observasi) awal (55*3)	165
Data observasi tidak lengkap	13
Total data observasi akhir (<i>unbalanced panel</i>)	152

Berikut daftar negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3. Daftar Negara Sampel Penelitian

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1	Albania	29	Kyrgyzstan
2	Angola	30	Macedonia
3	Argentina	31	Mexico
4	Australia	32	Moldova
5	Azerbaijan	33	New Zealand

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6	Benin	34	Nicaragua
7	Bolivia	35	Norway
8	Bosnia and Herzegovina	36	Paraguay
9	Brazil	37	Peru
10	Bulgaria	38	Poland
11	Cambodia	39	Portugal
12	Canada	40	Romania
13	Chile	41	Russia
14	Colombia	42	Serbia
15	Costa Rica	43	Slovakia
16	Croatia	44	Slovenia
17	Czech Republic	45	Spain
18	Dominican Republic	46	Sweden
19	Ecuador	47	Tajikistan
20	El Salvador	48	Thailand
21	France	49	Trinidad and Tobago
22	Georgia	50	Turkey
23	Germany	51	Ukraine
24	Guatemala	52	United Kingdom
25	Honduras	53	United States of America
26	Hungary	54	Venezuela
27	Italy	55	Vietnam
28	Kazakhstan		

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, media, web, internet dan lainnya (Sekaran & Bougie, 2017, p. 130). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2018, p. 240). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah indeks yang diterbitkan oleh IBP dan TI serta data tipe hukum negara yang diperoleh dari www.juriglobe.ca.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penggunaan regresi berganda, harus dipenuhi setidaknya empat asumsi. Berikut ini uji asumsi klasik untuk melihat keempat asumsi tersebut, yang dihitung berdasarkan nilai residu (kecuali multikolinearitas). Uji lineartias tidak dilakukan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari model regresi terbaik, tetapi hanya untuk menguji hipotesis.

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika variabel bebasnya berkolerasi. Hal ini menyebabkan pengambilan kesimpulan mengenai masing-masing koefisien regresi beserta pengaruhnya menjadi sulit. Hampir tidak mungkin untuk mendapatkan variabel yang sepenuhnya tidak berkaitan. Apabila variabel bebas sangat berkolerasi, maka kedua variabel tersebut sebenarnya tidak perlu digunakan dalam satu model regresi dikarenakan keduanya menjelaskan variasi yang sama pada variabel terikatnya (Lind et al., 2014, p. 137). Multikolinearitas dalam suatu model dapat diketahui dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), yakni suatu faktor yang mengukur seberapa besar kenaikan ragam koefisien variabel independen. Semakin besar kolerasi di antara variabel bebas, semakin besar nilai VIF (Supriyadi, Mariani, & Sugiman, 2017).

Dalam model regresi dengan interaksi (terdapat variabel moderating), secara tidak langsung dapat menyebabkan multikolinearitas. Hal ini dikarenakan sifat dari variabel moderasi yang memperkuat salah satu variabel. Karenanya, dalam penelitian ini menggunakan metode *mean-centering* pada variabel independen untuk menghindari masalah multikolinearitas tersebut. Penelitian ini menggunakan nilai VIF dengan dasar sebagai berikut.

- Jika nilai VIF > 10, maka terjadi masalah multikolinieritas.
- Jika nilai VIF < 30, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Uji Normalitas

Penelitian ini menilai distribusi residu untuk menguji normalitas data. Idealnya, nilai residu akan mengikuti pola distribusi probabilitas normal (Lind et al., 2014, p. 136). Uji normalitas dilakukan dengan melihat sebaran data pada grafik *P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pola garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering terjadi ketika suatu data dikumpulkan sepanjang periode waktu tertentu. Asumsi regresi mengharuskan masing-masing residu harus saling bebas yang berarti tidak terdapat pola residu, residunya tidak begitu berkorelasi dan tidak terdapat residu positif atau negatif jangka panjang (Lind et al., 2014, p. 139). Uji Autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (d) dan membandingkannya dengan nilai d_U dan d_L pada tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah $k=3$, dengan ketentuan sebagai berikut (Supriyadi et al., 2017):

- Jika $d > d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi
- Jika $d < d_L$, maka ada autokorelasi positif
- Jika $4 - d > d_U$, maka tidak ada autokorelasi negatif
- Jika $4 - d < d_L$, maka ada autokorelasi negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Denziana, Indrayenti, & Fatah, 2014). Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa variasi di sekitar persamaan regresinya konstan untuk seluruh variabel bebas (Lind et al., 2014, p. 136). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan diagram *scatter plot* dengan dasar analisis sebagai berikut:

- Jika titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal ini mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Supriyadi et al., 2017).

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode mengelola, meringkas, dan menyajikan data secara informatif (Lind, Marchal, & Wathen, 2014, p. 6). Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *Moderated Multiple Regression* (MMR) dengan bantuan *software* SPSS v.23. MMR adalah bentuk regresi linier berganda dengan uji interaksi di dalamnya. Uji interaksi adalah salah satu dari tiga cara (selain dari uji selisih mutlak dan uji residual) dalam menguji variabel moderator (Sugiono, 2004). MMR dalam penelitian ini menggunakan data kontinu sebagai prediktor dan kriteris, serta kategorikal sebagai moderator.

Skala data kontinu dalam penelitian ini adalah interval, untuk variabel X dan Y, dikarenakan data berbentuk indeks dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya variabel Y yang diukur menggunakan indeks persepsi korupsi dengan skor antara 0-100. Semakin tinggi skor, tingkat korupsi semakin rendah atau negara tersebut semakin bersih dari tindak korupsi. Apabila suatu negara memperoleh nilai 100, hal tersebut tidak selalu menandakan tidak adanya praktik korupsi di negara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena indeks dihasilkan dari suatu pengukuran. Begitu pun dengan variabel X. Untuk variabel moderator berbentuk kategori, jumlah kategori dalam model adalah k-1, sehingga dalam model penelitian ini, cukup satu kategori yang dimasukkan dalam model (yakni *common law*) dan yang satunya menjadi referensi.

Model MMR dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1mcX + b_2m_dummy + b_3mcX*m_dummy + e$$

dimana:

Y	: indeks persepsi korupsi
a	: konstanta
b ₁	: koefisien untuk kualitas SAI
b ₂	: koefisien untuk tipe hukum negara
b ₃	: koefisien interaksi
mcX	: <i>Mean-centering</i> dari kualitas SAI
m_dummy	: tipe hukum <i>common law</i>
mcX*m_dummy	: interaksi antara kualitas SAI dan <i>common law</i>
e	: nilai residu

3.2.6 Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini, kedua hipotesis diuji menggunakan uji t, dengan melihat koefisien dari masing-masing variabel dan tingkat signifikansinya. Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji hipotesis bahwa kualitas SAI berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi (**hipotesis I**), dan juga menguji hipotesis bahwa variabel tipe hukum negara dapat memoderasi pengaruh tersebut (**hipotesis II**). Beberapa hal yang akan dilihat dari *ouput* SPSS di antaranya adalah nilai koefisien setiap variabel untuk membentuk model regresi dan pengujian hipotesis, nilai *R Square* dan nilai *R Square Change* untuk melihat perubahan pengaruh dari keberadaan variabel moderasi, nilai t, serta nilai signifikansi.

3.2.6.1 Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial dari variabel X terhadap Y. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Signifikansi merupakan tingkat toleransi kesalahan pengambilan kesimpulan tipe 1, yakni menolak hipotesis yang benar (Sudjana, 2005). Untuk pengujian hipotesis berdasarkan *output* SPSS, dapat dilakukan dengan melihat langsung tingkat signifikansi pada tabel koefisien. Apabila tingkat signifikansi melebihi 5% maka H₀ tidak dapat ditolak. Berikut tahapan dalam uji t:

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Hipotesis statistik

Hipotesis I

$H_0: b_1 \leq 0$, kualitas SAI tidak berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

$H_1: b_1 > 0$, terdapat pengaruh positif kualitas SAI terhadap tingkat korupsi

Hipotesis II

$H_0: b_3 = 0$, tipe hukum negara tidak dapat memoderasi pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi

$H_1: b_3 \neq 0$, tipe hukum negara memoderasi pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi

- Kriteria uji

H_0 tidak dapat ditolak jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak (H_1 diterima) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Kemudian, jika ingin melihat pengaruh secara bersama-sama dari variabel prediktor terhadap variabel kriteria dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai F dan nilai signifikansinya pada tabel ANOVA.

3.2.6.2 R-Square Change

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilainya antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Denziana et al., 2014).

Nilai koefisien determinasi memiliki arti sebagai berikut.

- Semakin mendekati nol, variabel independen semakin terbatas dalam menjelaskan variabel dependen (pengaruhnya kecil dalam menjelaskan perubahan/variasi variabel dependen).
- Semakin mendekati satu, kemampuan variabel independen semakin besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Besaran pengaruh variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, pengaruh variabel kualitas SAI terhadap tingkat korupsi secara parsial. Kedua, pengaruh variabel kualitas SAI terhadap tingkat korupsi apabila dimoderasi oleh tipe hukum negara. Dari *output* SPSS, kedua pengaruh dapat dilihat dari nilai

Intan Siti Robiah, 2019

PENGARUH KUALITAS SUPREME AUDIT INSTITUTION TERHADAP TINGKAT KORUPSI YANG DIMODERASI OLEH TIPE HUKUM NEGARA (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

R-square. Sedangkan, perubahan besaran pengaruh sebelum dan sesudah adanya variabel moderasi dapat dilihat dari nilai *R-square change* atau perubahan nilai koefisien determinasi. Nilai ini menunjukkan seberapa besar variabel moderasi mengubah (menambah atau mengurangi) pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteria.